

## BAB IV

### KESIMPULAN

Diplomasi bilateral terhadap Korea Selatan, dilakukan oleh Jepang sebagai implementasi dari politik luar negeri, yang didasarkan untuk menyumbangkan perdamaian dan kemakmuran dunia, serta meningkatkan kepercayaan dengan negara tetangga. Permasalahan *comfort women* atau padanan dalam Bahasa Indonesia merupakan perbudakan seks, menjadi salah satu penyebab terhambatnya upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan. Mengacu pada rumusan masalah yaitu “Bagaimana Diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam permasalahan *Comfort Women*?”, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan diplomasi bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye dalam bidang ekonomi hingga permasalahan perbudakan seks.

Puncak dari diplomasi bilateral merupakan *Agreement on Comfort Women* atau Kesepakatan Perbudakan Seks, yang dilakukan pada 28 Desember 2015, sebagai tanda dari diplomasi permintaan maaf Jepang terhadap Korea Selatan. Secara resmi Jepang mengakui semua pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada para korban perbudakan seks, yang dilakukan oleh para militer Imperialisme Jepang selama 30 tahun, yaitu tahun 1910 hingga tahun 1945.

Bagi Korea Selatan, permasalahan perbudakan seks merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan membutuhkan permintaan maaf serta tanggung jawab yang konsisten di dalamnya. Para korban perbudakan seks pun sudah berkali-kali muncul untuk memberikan bukti yang didukung oleh masyarakat dan aktivis

Hak Asasi Manusia, untuk menuntut pemerintah Jepang segera mengaku, meminta maaf, dan mengganti kerugian atas kejahatan kemanusiaan.

Lain halnya bagi Jepang, Perjanjian Bilateral pada 1965 dengan Korea Selatan, dirasa sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang terjadi pada Perang Dunia II. Sehingga pemerintah dan masyarakat Jepang tidak menganggap permasalahan perbudakan seks penting dan hanyalah kesalahan militer Jepang di masa lalu. Jepang pun menilai bahwa Korea Selatan terlalu sentimental dalam permasalahan perbudakan seks. Tetapi ketika Shinzo Abe dilantik kembali pada tahun 2012 sebagai perdana menteri, beliau dalam salah satu kebijakannya akan memperbaiki status Jepang dalam dunia internasional, termasuk berupaya menyelesaikan permasalahan perbudakan seks dengan melakukan diplomasi permintaan maaf terhadap Korea Selatan, untuk membuka jalur komunikasi dan permintaan maaf secara formal, melalui Kesepakatan Perbudakan Seks.

Proses dari upaya diplomasi permintaan maaf pun tidak hanya dilakukan antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye saja, tetapi juga dilakukan negosiasi dari Kementerian Luar Negeri dan pertemuan tertutup Direktur Jenderal dari kedua negara. Pertemuan dilakukan sejak 16 April 2014 hingga satu hari sebelum perjanjian dilakukan, yaitu pada 27 Desember 2015. Di pertengahan proses negosiasi antara Direktur Jenderal Jepang dan Korea Selatan pada November 2015, Perdana Menteri Abe dan Presiden Park mengadakan pertemuan secara bilateral, setelah Forum Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral dengan Tiongkok, bertempat di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan bilateral

membahas dan mengkonfirmasi kembali kesepakatan penyelesaian permasalahan perbudakan seks.

Poin - poin utama dari Kesepakatan Perbudakan Seks yaitu konfirmasi atas perjanjian akhir dan tidak dapat diubah lagi, permintaan maaf yang tulus dari Jepang, resolusi akhir terkait permasalahan perbudakan seks melalui kompensasi dana, merelokasikan patung yang terdapat di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, serta tindakan untuk saling menahan diri dalam mengkritik satu sama lain dalam forum internasional. Kemudian perjanjian disepakati tepatnya pada tanggal 28 Desember 2015 dan Perdana Menteri Abe beserta Presiden Park berjanji akan mematuhi dan bertanggung jawab terhadap perjanjian kepada para korban perbudakan seks yang masih hidup, melalui Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan dan *Asian Women's Fund* yang dibentuk oleh persetujuan Jepang dan Korea Selatan.

Tidak lama setelah perjanjian dilakukan, terdapat kecaman - kecaman yang timbul baik dari masyarakat Jepang dan Korea Selatan, para aktivis, dan juga kelompok kepentingan politik. Mereka berpendapat bahwa Kesepakatan Perbudakan Seks dilakukan hanya demi kepentingan politik antar pemimpin negara saja, tidak berorientasi kepada pendapat para mantan perbudakan seks. Pernyataan yang berbeda pun diungkapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada 1 Februari 2016 pada Forum PBB, bahwa Jepang tidak melakukan kejahatan seksual pada saat Imperialisme Jepang. Pernyataan beliau tentu membingungkan banyak pihak, termasuk Korea Selatan sendiri. Lalu pemerintah dari Jepang dan Korea Selatan pun pada akhirnya tidak menghiraukan kecaman - kecaman yang timbul, hingga

akhirnya pemerintahan Park Geun Hye digantikan oleh Moon Jae in pada tahun 2017.

Ketika Presiden Moon Jae In dilantik, beliau menanggapi kecaman masyarakat Korea Selatan dengan mengadakan tuntutan kembali dan meminta Jepang untuk melakukan negosiasi ulang terkait Kesepakatan Perbudakan Seks. Presiden Moon mengatakan bahwa perjanjian tidak berakar pada para korban perbudakan seks dan dana kompensasi yang diberikan melalui yayasan yang dibentuk, tidak sepenuhnya didapatkan oleh para korban perbudakan seks. Jepang menanggapi tuntutan dari Korea Selatan dengan cara menolak secara tegas, bahwa Kesepakatan Perbudakan Seks bersifat akhir dan tidak dapat diubah sampai kapanpun, meminta Korea Selatan untuk mematuhi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua negara secara sah, dan mendesak untuk merelokasikan Patung Perbudakan Seks yang berada di depan Kantor Konsulat Jenderal Jepang di Busan, Korea Selatan, karena patung perbudakan seks dianggap sebagai mencemar nama baik Jepang terhadap Kesepakatan Perbudakan Seks yang sudah disepakati. Desakan dari Jepang terhadap Korea Selatan merupakan salah satu bentuk upaya diplomasi Jepang agar kerjasama bilateral tetap berjalan.

Kekesalan Korea Selatan pun berlanjut hingga pada Juli 2018, saat Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Hwa, memutuskan untuk mengakhiri Kesepakatan Perbudakan Seks secara sepihak, setelah membubarkan Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan dan tidak akan melakukan negosiasi ulang. Begitu juga dengan Menteri Kementerian Kesetaraan *Gender* dan Keluarga Korea Selatan, yang akan merelokasi dana kompensasi kepada para korban perbudakan seks secara

langsung. Sikap dari Korea Selatan pun tidak ditanggapi oleh Jepang, karena Jepang bersikeras untuk tetap berpegang teguh pada Kesepakatan Perbudakan Seks yang dilakukan pada tahun 2015, dan meminta Korea Selatan untuk tidak melanggar perjanjian yang menjadi pilar dasar dari kerjasama bilateral antara kedua negara.

Perdana Menteri Shinzo Abe pun sudah menyatakan berkali - kali, bahwa Jepang menginginkan adanya kerjasama bilateral dengan Korea Selatan yang berorientasi pada masa depan, dan menganggap Kesepakatan Perbudakan Seks merupakan sebuah akhir dari penyelesaian permasalahan perbudakan seks yang tidak dapat diganti, sehingga apapun tuntutan dari Korea Selatan tidak akan ditanggapi oleh Jepang. Terbukti saat Perdana Menteri Shinzo Abe tetap melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Moon Jae In pada bulan Januari tahun 2018 di Korea Selatan, untuk membahas mengenai Pertandingan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang.

Peran dari media massa juga turut ikut serta dalam upaya diplomasi Jepang terhadap Korea Selatan dalam penyelesaian permasalahan perbudakan seks. Melalui media massa, para masyarakat Jepang, Korea Selatan, maupun seluruh dunia, mendapatkan informasi bagaimana tanggapan dari masing - masing pemerintah kedua negara setelah Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015 disepakati. Dari media massa di Jepang, yakni seperti *Japan News*, *The Japan Times*, dan *The Mainichi*, mempunyai pendapat yang sama bahwa perjanjian yang disepakati antara Jepang dan Korea Selatan, merupakan awal yang baru bagi hubungan bilateral kedua negara, dan Korea Selatan tidak seharusnya menuntut kembali karena secara langsung dapat berdampak kepada hubungan bilateral, serta

sudah saatnya untuk melihat ke masa depan. Begitu juga dengan media yang berasal dari Korea Selatan yaitu *Hankyoreh*, meliput mengenai tanggapan dari pemerintah Jepang, bahwasanya Jepang secara tegas tidak akan melakukan negosiasi kembali Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015 dan lagi - lagi meminta Korea Selatan untuk tetap mematuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Tanggapan yang berbeda datang dari media massa di Korea Selatan, yakni *Korean Herald*, *Korean Times*, dan *KBS World* yang mengkritik bahwa Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015, tidak sepenuhnya berorientasi kepada para korban perbudakan seks, tetapi hanya untuk memperbaiki citra Jepang saja. Sehingga para media tidak setuju dengan perjanjian dan mempunyai pendapat yang sama dengan para masyarakat dan pemerintah Korea Selatan, untuk menuntut kembali Jepang agar bertanggung jawab secara penuh. Presiden Moon Jae In pun menanggapi para media dan masyarakat dengan berjanji untuk mencari solusi, yang berorientasi kepada para korban perbudakan seks.

Upaya diplomasi dari Jepang untuk menyelesaikan permasalahan perbudakan seks memiliki banyak gejolak dari pihak Korea Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa diplomasi bilateral dan diplomasi permintaan maaf Jepang melalui Kesepakatan Perbudakan Seks tahun 2015, merupakan cara Perdana Menteri Shinzo Abe untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan dan mengembalikan citra Jepang di dunia internasional. Dengan tetap bekerjasama secara bilateral dengan Korea Selatan, maka kepentingan Jepang secara domestik maupun internasional dapat terpenuhi. Kesepakatan Perbudakan Seks pun pada faktanya memang tidak bisa dituntut maupun dilakukan negosiasi kembali, karena

Jepang dan Korea Selatan sudah sepenuhnya sepakat, sehingga para masyarakat dan korban perbudakan seks hanya bisa menerima apa yang pemerintah Korea Selatan dan Jepang sudah lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagdonas, Ažuolas. "Historical State Apologies." *The Palgrave Handbook of State-Sponsored History After 1945*, 2018: 780.
- Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi antara teori & praktik*. 2008.
- International Society for Educational Information. *Japan in Modern History: High School Vol. I*. Tokyo: International Society for Educational Information. Inc. 1995.
- Kissinger, Henry. *Diplomacy*. New York: Simon & Schuster, 2012.
- Laura Maruster, *Qualitative Research Methods*. Thousand Oaks: SAGE. 2013.
- Tomlinson, Jeremy. *National Apologies: Mapping the Complexities of Validity, a Practical Paper*. 2012.

### Artikel Jurnal

- David, Roman. "The past or the politics of the present? Dealing with the Japanese occupation of South Korea." *Contemporary Politics* 22, no. 1 (2015), 57-76. doi:10.1080/13569775.2015.1112953.
- Egler, David G. "The Japanese Wartime Empire, 1931–1945." *History: Reviews of New Books* 25, no. 3 (1997), 134-134. doi:10.1080/03612759.1997.9952840.
- Filippello, Chiara. *Comfort Women: Japan, South Korea and the painful struggle for memory reconciliation*. Thesis, 2018.
- Fukuoka, Kayuza. *A Critical Appraisal of the 'Comfort Women' Agreement between Japan and South Korea*. March 30, 2016. <https://www.e-ir.info/2016/03/30/appraising-the-comfort-women-agreement-between-japan-and-south-korea/>.
- Fumitoshi, Yoshizawa. "The Japan–ROK claims settlement and the comfort women." In *Denying the Comfort Women*, by Nishino Rumiko, Kim Puja and Onozawa Akane (ed.). London: Routledge, 2018.
- Harold, Scott W. *How Can Japan Improve Relations with South Korea?* *Asia-Pacific Review* 22, No. 1, 2015.
- Hayashi, Hirofumi. *Disputes in Japan over the Japanese Military "Comfort Women" System and its perception in history*. *The annals of the American academy of political and social science* 617 1, 2008: 127.
- Hellmann, Donald C. "Japan and Korea: The Political Dimension. By Chong-Sik Lee. Stanford: Hoover Institution Press, 1985. 225." *The Journal of Asian Studies* 48, no. 3 (1989), 638-639. doi:10.2307/2058691.
- Hein, Patrick. "Unresolved Comfort Women Issue." *The Korean Journal of International Studies* 14, no. 3 (2016), 447. doi:10.14731/kjis.2016.12.14.3.447.
- Jonsson, Gabriel. "Can the Japan-Korea Dispute on 'Comfort Women' be Resolved?" *Korea Observer* 46 No. 3, 2015.



- Kazue, Muta. "The 'comfort women' issue and the embedded culture of sexual violence in contemporary Japan." *Current Sociology* 64, no. 4 (2016), 620-636. doi:10.1177/0011392116640475.
- Kim, Ji Y., and Jeyong Sohn. "Settlement Without Consensus: International Pressure, Domestic Backlash, and the Comfort Women Issue in Japan." *Pacific Affairs* 90, no. 1 (2017), 77-99. doi:10.5509/201790177.
- Kingston, Jeff. Review of *Denying the Comfort Women: The Japanese State's Assault on Historical Truth* ed. by Nishino Rumiko, Kim Puja, and Onozawa Akane. *Monumenta Nipponica* 74, no. 1 (2019): 155. doi:10.1353/mni.2019.0008
- Kumagai, Naoko. "The Background to the Japan-Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue." *Asia-Pacific Review* 23, no. 1 (2016), 65-99. doi:10.1080/13439006.2016.1195955.
- Morgenthau, Hans J. "Diplomacy." *The Yale Law Journal* 55, no. 5. 1946. doi:10.2307/792754.
- Mikyong, Kim. *Memorializing Comfort Women: Memory and Human Rights in Korea-Japan Relations*. Asian Politics & Policy 6 No. 1 , 2014: 87.
- Miller, J. Berkshire. "Japan and Korea Must Look Forward." *Policy Brief*, May 1, 2018.
- Moon, Hwang Kyung. *COMFORT WOMEN BEHOLDEN TO HISTORY*. Past Forward: Essays in Korean History, 2019.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Japan's Efforts on the Issue of Comfort Women." *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. November 30, 2020. <https://www.mofa.go.jp/files/000473133.pdf>
- Nakamura, Jessica. *Transgenerational Remembrance: Performance and the Asia-Pacific War in Contemporary Japan*. EVANSTON, ILLINOIS: Northwestern University Press, 2020. Accessed January 8, 2021.
- Soo, Jo Yun. "The Abe Administration's Perception and Policy Toward the Japanese Military "Comfort Women". "Issue: With a Focus on the 2015 Korea-Japan Agreement." *The Korea Journal of Japanese Studies* No. 48, 2018.
- Sook, Kim Hyun. *History and Memory: The "Comfort Women" Controversy*. Bodies in Contact: Rethinking Colonial Encounters in World History (Duke University Press), 2005.
- Takahara Akio. "Forty-four Years of Sino-Japanese Diplomatic Relations Since Normalization." *China-Japan Relations in the 21st Century*, 2017, 25-65. doi:10.1007/978-981-10-4373-4\_2.
- Takekawa, Shunich. *The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan*. The Review of Korean Studies 19 No. 1, 2016: 250.
- Tamaki, T. *It takes two to Tango: the difficult Japan-South Korea*. *Japanese Journal of Political Science*, 2019.

- Tamaki, T. "Taking the 'taken-for-grantedness' seriously: problematizing Japan's perception of Japan-South Korea relations." *International Relations of the Asia-Pacific* 4, no. 1 (2004), 147-169. doi:10.1093/irap/4.1.147.
- Tanaka, Yuki. "'Comfort Women Bashing' and Japan's Social Formation of Hegemonic Masculinity." *History Wars' and Reconciliation in Japan and Korea*, 2016, 163-182. doi:10.1057/978-1-137-54103-1\_9.
- The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan. *The Japanese Military Sexual Slavery ("Comfort Women") Issue*. Submission, Seoul: the Committee against Torture 50th Session, 2013.
- Ward, Thomas J., and William D. Lay. *The Comfort Women Controversy: Not Over Yet*. *East Asia* 33 (4), 2016: 260.
- Yale Journal of International Law. *Not "Final and Irreversible": Explaining South Korea's January 2018 Reversal on the "Comfort Women" Agreement*. February 1, 2018. <https://www.yjil.yale.edu/not-final-and-irreversible-explaining-south-koreas-january-2018-reversal-on-the-comfort-women-agreement/>
- Yamaguchi, Tomomi. *Revisionism, ultranationalism, sexism: Relations between the far right and the establishment over the comfort women issue*. *Social Science Japan Journal* 21 No. 2, 2018.
- Yoon, Seok Hee. *Relations Between Japan and Korea: A Diachronic Survey in Search of A Pattern*. Christchurch: University of Canterbury, 2015.

### **Situs Web**

- "IIST WORLD FORUM Ban Lifted on Japanese Popular Culture in South Korea \*Hitoshi Suzuki." 一般財団法人 国際経済連携推進センター. [https://www.cfiec.jp/wf/magazine/0241/0241\\_E.html](https://www.cfiec.jp/wf/magazine/0241/0241_E.html).
- "Japan and the Power of an Apology – Journal of Diplomacy." TLTC Blogs. <https://blogs.shu.edu/journalofdiplomacy/2015/09/japan-and-the-power-of-an-apology/>.
- "The "Comfort Women" Controversy: History and Testimony." *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*. <https://apjpf.org/-Yoshiko-Nozaki/2063/article.html>.
- Asian Women's Fund. *Number of Comfort Stations and Comfort Women*. <https://awf.or.jp/e1/facts-00.html>.
- Asian Women's Fund. *Who were the Comfort Women?-Who were the Comfort Women? The Establishment of Comfort Stations*. <https://awf.or.jp/e1/facts-00.html>.
- BBC News. *'Comfort Women': Japan and South Korea Hail Agreement*. December 28, 2015. <https://www.bbc.com/news/world-asia-35190464>.
- Digital Museum The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund. *Projects by Country or Region-South Korea*. <https://www.awf.or.jp/e3/korea.html>.

- KBS World Radio *Moon Vows to Seek Resolution of 'Comfort Women' Issues until Victims Satisfied*. August 14, 2020.  
[https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=e&Seq\\_Code=155571](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=155571)
- KBS World Radio. *Moon Vows to Seek Resolution of 'Comfort Women' Issues until Victims Satisfied*. August 14, 2020.  
[https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=e&Seq\\_Code=155571](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=155571)
- KBS World Radio. *Utusan Khusus Presiden Moon Untuk AS Dan Jepang Lanjutkan Diplomasi*. May 18, 2017.  
[https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=4582](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=4582).
- KBS. *Japan Ramping Up Pressure on Busan District Office over 'Comfort Women' Statue*. August 11, 2020.  
[http://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=e&Seq\\_Code=155486](http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=155486)
- Suparto, Idayu. *South Korea-Japan 'comfort Women' Deal: How the Media in Both Countries Reported It*. December 29, 2015.  
<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-japan-comfort-women-deal-how-the-media-in-both-countries-reported-it> (accessed December 8, 2020).
- The Hankyoreh (English Edition). *Abe Says S. Korea and Japan "share Same Basic Values" in Policy Speech for 1st Time in 6 Years*. January 21, 2020.  
[http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/925291.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/925291.html)
- The Hankyoreh (English Edition). *How the Dream of a Comfort Woman Statue in Busan Came True*. January 16, 2017.  
[http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/925291.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/925291.html)
- The Hankyoreh (English Edition). *Japanese Government Rules out Further Action on Comfort Women Agreement*. January 10, 2018.  
[https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/827150.html](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/827150.html)
- The Japan Times. *Seoul Guts the 'comfort Women' Agreement*. November 23, 2018. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/11/23/editorials/seoul-guts-comfort-women-agreement/>
- The Mainichi. *Editorial: S. Korean Policy on 'comfort Women' Agreement Hurting Basis of Deal*. January 11, 2018.  
<https://mainichi.jp/english/articles/20180111/p2a/00m/0na/018000c>
- The Peninsula Qatar. *South Korea's Park, Japan's Abe hold first formal bilateral talks*. November 2, 2015.  
<https://thepeninsulaqatar.com/article/02/11/2015/South-Korea-s-Park,-Japan-s-Abe-hold-first-formal-bilateral-talks> (accessed December 5, 2020).
- Voice of America. *South Korea's Moon Says 2015 'Comfort Women' Agreement With Japan 'Flawed'*. December 27, 2017. <https://www.voanews.com/east-asia/south-koreas-moon-says-2015-comfort-women-agreement-japan-flawed>
- Xinhua News. *China Urges Japan to Responsibly Deal with Comfort Women Issue*. January 10, 2018. [https://www.xinhuanet.com/english/2018-01/10/c\\_136885451.htm](https://www.xinhuanet.com/english/2018-01/10/c_136885451.htm).